

## **PARA AKTIFIS, "MASUKLAH KEDALAM KANDANG" !**

03 Oktober 2026

Oleh: H. Moch Ali Bin Dachlan

Kemarin , 02 Oktober, sejumlah aktivis yang sangat kritis, tiba tiba mengenakan jas dan dasi serta dihiasi topi hitam dan di dadanya bertengger lambang institusi sebuah lembaga negara. Nampanya mereka mendapat panggung kehormatan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Syahganda Nainggolan dan Rocky Gerung menduduki jabatan sebagai bos Bakom dan anggota Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres) bersama sejumlah tokoh sipil dan militer.

Saya mau mengatakan bahwa Presiden Prabowo adalah presiden Indonesia yang hebat, dmokratis dan terbuka. Bagaimana tidak ? Bukankah beberapa bulan yang lalu, presiden tersebut sudah undang 1200 pakar, akademisi dan pimpinan Universitas ? Bukankah presiden juga sudah undang para wartawan untuk berdialog ?. Kini para aktivis itu juga diundang ke istana untuk dilantik sebagai pembantunya.

Kini, terserah pada mereka yang berteriak keras seakan sebagai pejuang kebebasan ,pejuang kebenaran dan keadilan. Beranikah anda semua, hai para aktivis untuk tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran melalui jabatan yang anda emban ?.

Jika anda berubah total seketika setelah memasuki kandang yang baru, kandang birokrasi pemerintahan, bersiaplah untuk menerima gelar baru dari masyarakat, "Lihat itu para penjilat lapar, sedang mengais rumput yang diberikan oleh para penggembala (pengarat)."

Semoga Presiden Indonesia yang hebat, tidak sedang mentertawakan anda, sebagai orang- orang goblok, orang- orang yang gila jabatan, orang yang sok kritis tetapi mengincar jabatan. Para aktivis Jakarta, masuklah kamu ke dalam kandang. Sedangkan Allah swt ,hanya mengundang orang orang baik, agar masuk ke dalam surga ( Al Quran Surat Al Fajr ).

### **Strategi Rangkul-Peluk**

Dalam system presidensial terdapat pembatasan yang jelas antara executive, legislative dan yudikatif. Executive di mana Presiden -wakil presiden langsung di pilih oleh rakyat. Berkuasa sesuai yang sudah ditentukan oleh UU seperti dalam 1 periode sepanjang 5 tahun.

Sedangkan parlementer gabungan antara executive dan legislative dalam makna Perdana Menteri merupakan bagian dari partai dominan di parlement yang dipilih oleh parlement itu sendiri. Sedangkan menteri-menterinya merupakan anggota perwakilan dari partai-partai di parlement. Dalam kondisi demikian system parlementer tidak bisa seorang perdana menteri tidak sepaham dengan parlemen, setidaknya harus sesama anggota partai di dalam parlemen itu harus seiring sejalan. Bagaimana pun kondisi perdana menteri sangat bergantung pada stabilitas parlement. Jika parlement meresetui maka perdana menteri dapat berjalan sepanjang periode kepemimpinannya. Bilamana perdana menterinya tidak sejalan dengan parlemen mudah baginya untuk diturunkan di tengah jalan.

Berbeda dengan system presidensial seperti di Indonesia, kedudukannya sangat kuat karena presiden tidak dapat “diganggu” begitu saja oleh parlement. Bagaimana pun juga pada system presidensial, presiden merupakan kepala Negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan pada system parlemen Presiden atau raja sebagai kepala Negara dan yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri yang merupakan bagian dari parlemen itu sendiri.

Pada suasana demikian jelas system presidensial mempunyai kelebihanannya sendiri yaitu relative stabil karena tidak “bergantung” pada parlemen dalam arti kata ada pemisahan kekuasaan executive dan legislative pada system presidensial. Pada system presidensial tidak mudah memberhentikan presiden di tengah jalan. Pada kondisi ini semangat oposisi menjadi sangat tertantang, sehingga banyak yang tidak kuat menjadi oposisi.

Oleh karenanya walaupun Indonesia dikatakan sebagai Negara demokratis, tidak terlalu nampak ada semangat oposisi secara formal. Melainkan dilakukan oleh elemen-elemen di dalam masyarakat, seperti aktivis pro demokrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan partai-partai tidak terlalu kentara menjadi oposisi. Hanya saja terlihat ada partai yang tidak masuk dalam koalisi. Misalnya saat ini yang tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP. Mungkin ada saja partai yang lain tetapi, tidak signifikan karena hanya partai gurem.

Pada konteks Indonesia sebenarnya oposisi bisa saja memilih model oposisi konstruktif, yaitu oposisi yang bersifat membangun. Memberi saran dan kritik tetapi tidak bermaksud

menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Bagaimana pun ada model oposisi destruktif yang maksudnya memang hendak menjatuhkan pemimpin atau pemerintahan yang berkuasa.

Hanya saja, model oposisi konstruktif tidak berjalan secara ideal. Padahal pada konteks oposisi konstruktif ini, pihak-pihak kritis masih mendukung pemerintah selama kebijakannya memberikan kebaikan kepada masyarakat. Pada kenyataannya menjadi oposisi tetap menjadi kurang menarik di Indonesia, karena memang bangunan ideology kebangsaannya tidak menancap kuat pada hati sanubari partai-partai dan masyarakat Indonesia umumnya.

Pada konteks demikian mudah saja bagi pemerintah yang partainya memenangkan pemilu melemahkan para oposisi dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan merangkul dan memeluk semua partai yang ada dan semua pihak yang dinilai kritis. Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan contoh telak dari “kematian” oposisi di Indonesia karena pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan pemerintahan tergemuk sepanjang sejarah reformasi. Terdiri dari ratusan kabinet sebagai akumulasi total dari banyaknya strategi rangkul dan peluk yang dilakukan oleh Prabowo \_Gibran.

Pertanyaannya apakah dengan menarik sebegitu banyak pihak-pihak, pemerintahan Prabowo \_Gibran dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia? Gambaran paling sederhana atas tidak adanya bukti antara pengangkatan kabinet dan lain sebagainya sebagai pembantu Presiden Prabowo di dalam pemerintahan untuk segera dapat mensejahterakan rakyat Indonesia adalah dengan melihat mata uang antara dollar dengan rupiah. Pada saat ini dollar tembus 18 ribu rupiah. Artinya ketika kabinet tergemuk dimiliki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran justru membuat rupiah semakin tertekan. Belum pernah terjadi dalam sejarah setelah reformasi rupiah berada di level saat ini.